



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Brigjend Katamsa No. 11 Telp. (0536) 3224547 Email: bp3akkb.kalteng@gmail.com
PALANGKA RAYA 73112

LAPORAN PERJALANAN DINAS

- Kepada Yth : Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
- Dari : Drs. MURJANI dan ELVI OKTAVINA, SE.
- Perihal : Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Koordinasi dan Kaji Banding PPID ke Provinsi Jawa Barat.
- Tanggal Laporan : 26 Juni 2023
- Dasar Pelaksanaan : 1. Surat Perintah Tugas Nomor : 094/139/SPT/DP3APPKB tanggal 14 Juni 2023.
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/116/BID. II/DP3APPKB tanggal 14 Juni 2023.
- Sumber Dana : DPA SKPD Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.
- I. **Materi Pokok Kegiatan** : Dalam rangka Rapat Koordinasi dan Kaji Banding PPID ke Provinsi Jawa Barat.
- II. **Deskripsi Pelaporan**
1. Dalam rangka Rapat Koordinasi dan Kaji Banding PPID Provinsi Jawa Barat pada tanggal 18 s.d 21 Juni 2023 di Bandung.
 2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Sri Suwanto) didampingi oleh Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah (Agus Siswadi) dan didampingi oleh KI Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 3 (tiga) orang serta dihadiri oleh Semua PPID Utama Kabupaten/Kota dan PPID Pelaksana Provinsi Kalimantan Tengah.
 3. Sebelum kegiatan Kaji Banding dan Rakoor PPID dilaksanakan, Assisten III dan Kepala Kominfosantik diterima oleh Wakil Gubernur Jawa Barat (UU' Ruzhanul Ulum).

4. Hasil Rapat Koordinasi PPID Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Sekaligus Kaji Banding ke PPID Utama Provinsi Jawa Barat pada tanggal 18 s.d 21 Juni 2023 di Bandung adalah sebagai berikut :

Tujuan Kaji Banding ke PPID Utama Provinsi Jawa Barat yaitu untuk menambah wawasan PPID Kalimantan Tengah, untuk belajar dan mendengar secara langsung pengalaman PPID Jawa Barat dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Sebagai PPID yang meraih predikat provinsi terbaik pertama dalam indeks keterbukaan informasi publik (IKIP) pada tahun 2022, Provinsi Jawa Barat memiliki berbagai inovasi dalam pelayanan informasi. Program strategis Diskominfo Jabar pada tahun 2022 meliputi e-Office, dashboard pimpinan, e-Mail Official, Jabar Cloud, Penataan Jaringan, dan Pengelolaan Informasi. Jabar juga memiliki Jabar Command Center yang mengintegrasikan berbagai aplikasi seperti ekosistem data Jabar, satu data Jabar, Jabar open data, satu peta Jabar, dan lain-lain. Program-program ini juga merupakan salah satu upaya untuk mendukung Provinsi Jawa Barat menuju Provinsi Digital.

Pada pelayanan informasi publik di Kantor Samsat Bandung, terdapat inovasi layanan yang mengintegrasikan sistem informasi kesamsatan dan strategi optimalisasi peningkatan pendapatan. Layanan-layanan yang diberikan meliputi layanan informasi wajib pajak, layanan pengaduan wajib pajak, layanan konsultasi pajak, layanan penagihan secara elektronik, dan lain-lain. Indeks IKIP dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 juga menunjukkan kenaikan yang signifikan dari skor 71.37 ke 75.40. Kantor Samsat Bandung juga menyediakan pelayanan bagi pemohon berkebutuhan khusus dengan menyediakan form permohonan informasi publik dengan menggunakan huruf Braille. Sedangkan di Kabupaten Bandung, pelaksanaan kegiatan PPID dilaksanakan dengan rapat koordinasi implementasi keterbukaan informasi publik dengan PPID Pelaksana se-Kabupaten Bandung. Selain itu terdapat kegiatan peningkatan kapasitas PPID Pelaksana melalui berbagai macam bimbingan teknis seperti bimtek implementasi keterbukaan informasi publik, bimtek penyusunan daftar informasi publik, bimtek ketrampilan pembuatan konten, dan lain-lain. Monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP terhadap 76 PPID Pelaksana se-Kabupaten Bandung juga dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Sebagai tambahan, Kabupaten Bandung juga telah melaksanakan inisiasi pembentukan PPID Desa dan PPID Sekolah.

Apabila dibandingkan dengan PPID Pelaksana di Provinsi Jawa Barat, PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah tentu perlu melakukan banyak pembenahan. Terutama dari segi infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM PPID Pelaksana. Hal ini tentunya akan terwujud dengan adanya komitmen pimpinan dan dukungan dana.

Terkait dengan rapat koordinasi, acara diisi dengan sharing indikator monitoring pelayanan informasi publik dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu juga diisi dengan sharing pelayanan informasi publik dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota Palangka Raya.

III. Kesimpulan/ Harapan

Melalui Kaji Banding ini akan menjadi motivasi dan insperasi bagi PPID Provinsi Kalimantan Tengah, agar bisa berpikir dan bekerja seperti Provinsi Jawa Barat. Prinsipnya semangat dari teman-teman Kaltengt perlu diapresiasi, karena hal ini menjadi entry point bagaimana suatu daerah itu maju, ketika SDMnya memang Profesional.

IV. Penutup

Demikian laporan hasil perjalanan dinas ini disampaikan agar menjadi bahan selanjutnya, Terima kasih.

Palangka Raya, 26 Juni 2023

Yang Membuat Laporan,

1. Drs. MURJANI

2. ELVI OKTAVINA, SE.

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah;
Up. Sekretaris Daerah
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala BappedaLitbang Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Arsip.



LAMPIRAN PHOTO KEGIATAN RAKOR DAN KAJI BANDING
PPID DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023



LAMPIRAN PHOTO KEGIATAN RAKOR DAN KAJI BANDING
PPID DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023